



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

KERANGKA TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian yang sedang dilakukan sekarang ini dan mempelajari berbagai hasil yang didapat sebagai sarana dalam meninjau kemungkinan yang dapat ditemui pada penelitian sekarang ini. Peneliti menggunakan dua penelitian terdahulu sebagai sarana dalam mempelajari berbagai pemahaman yang sejalan dengan yang peneliti lakukan sekarang ini.

Penelitian terdahulu pertama berasal dari skripsi karya Rizky Fitria pada tahun 2012 yang berjudul "*Konstruksi Isu Kasus Korupsi Wisma Atlet dalam Surat Kabar Jurnal Nasional dan Koran Tempo: Sebuah Studi Analisis Framing.*" Penelitian ini dilakukan guna mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Komunikasi di Universitas Multimedia Nusantara. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Koran Tempo dan Jurnal Nasional dalam mengkonstruksi pemberitaan seputar isu wisma atlet. Penelitian ini menggunakan teori konstruksi sosial atas realitas untuk melihat cara kedua media massa mengkonstruksikan peristiwa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivis. Pengumpulan data mencakup pengumpulan data primer berupa teks berita dari Koran Tempo dan Jurnal Nasional dan data sekunder didapat melalui wawancara. Metode yang digunakan adalah analisis *framing* model Zhongdang

Pan dan Gerald M. Kosicki yang mengedepankan empat konsep framing dalam membedah berita yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan retorik.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Jurnal Nasional lebih mengedepankan pemberitaan ke arah hukum. Hal ini dapat dilihat dari penerapan elemen sintaksis yang dilakukan Jurnal Nasional dengan mengedepankan narasumber yang memiliki otoritas hukum. Sedangkan Koran tempo lebih mengedepankan pemberitaan pada ranah politik dengan memberikan ruang bagi politisi untuk berbicara menanggapi kasus korupsi yang diduga melibatkan rekan separtainya.

Pada elemen skrip, Koran Tempo maupun Jurnal Nasional lebih mengedepankan aspek *who* dan *what*. Kedua aspek ini ditonjolkan dengan tujuan unyuk lebih menampilkan pihak mana saja yang berbicara dan hal apa saja yang dibicarakan. Penonjolan berita pada elemen retorik dilakukan Jurnal Nasional dengan banyak menempatkan leksikon seperti kata “suap” untuk menekankan kasus korupsi ini pada penyusunan di Sesmenpora. Sedangkan Koran tempo banyak mengedepankan *lower deck*, *pull out*, dilengkapi dengan gambar dan info grafis pada berita *headline*-nya.

Kesimpulannya bahwa pemberitaan mengenai kasus suap wisma atlet dikonstruksikan secara berbeda oleh Jurnal Nasional dan Koran Tempo karena perbedaan perpektif. Jurnal Nasional melihat kasus ini dengan berpegang pada jurnalisme positif yang mengarahkan pemberitaan pada hal-hal positif. Sedangkan Koran Tempo memandang kasus ini sebagai sebuah kesempatan bagi para koruptor karena kekuasaan yang mereka miliki.

Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi yang baik bagi peneliti dalam memaknai berita sebagai wacana yang dikonstruksikan media massa. Jika dibandingkan, penelitian ini dengan yang peneliti lakukan sekarang ini sama-sama menggunakan metode analisis *framing*, tetapi menggunakan model *framing* yang berbeda. Penelitian ini menggunakan konsep *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki yang membedah teks berita melalui makna sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Sedangkan penelitian yang tengah peneliti lakukan sekarang ini menggunakan analisis *framing* Entman.

Analisis *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki yang dilakukan pada penelitian terdahulu ini kurang menonjolkan mengenai objek-objek pemberitaan yang dianggap sebagai aktor utama untuk dipersalahkan atau didukung keberadaannya. Berbeda halnya dengan penggunaan *framing* Entman yang lebih menampilkan pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab pada permasalahan dan siapa saja yang dianggap diselamatkan atau terselamatkan dalam pemberitaan melalui empat konsep yaitu: *define problems* (pendefinisian masalah), *diagnose causes* (memperkirakan penyebab masalah), *make moral judgement* (membuat pilihan moral), dan *treatment recommendation* (menekankan penyelesaian masalah). Konsep *framing* Entman akan lebih memberikan kesempatan bagi peneliti untuk lebih menunjukkan arah keberpihakan media massa melalui elemen makro. Kategorisasi mikronya berupa pemilihan bahasa, istilah, kutipan, dan hal-hal penunjang yang menjadi perhatian peneliti dapat ditentukan berdasarkan objektivasi peneliti.

Penelitian terdahulu kedua berasal dari skripsi karya Gabrella Sabrina pada tahun 2012 yang berjudul “*Analisis Framing Dugaan Keterlibatan Edhie Baskoro Yudhoyono dalam Kasus Korupsi Hambalang Pada Koran Tempo dan Jurnal Nasional.*” Penelitian ini dilakukan guna mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Komunikasi di Universitas Multimedia Nusantara. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Koran Tempo dan Jurnal Nasional mengkonstruksi dugaan keterlibatan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dalam kasus korupsi Hambalang. Penelitian ini menggunakan teori konstruksi sosial atas realitas untuk melihat cara kedua media massa mengkonstruksikan peristiwa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivis. Pengumpulan data mencakup pengumpulan data primer berupa teks berita dari Koran Tempo dan Jurnal Nasional dan data sekunder didapat melalui wawancara. Metode yang digunakan adalah analisis *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki yang mengedepankan empat konsep framing dalam membedah berita yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan retorik.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan unsur sintaksis yang ditunjukkan Koran Tempo dan Jurnal Nasional menunjukkan bahwa narasumber yang didahulukan memiliki otoritas hukum. Analisis skrip pada koran Koran Tempo menunjukkan bahwa kasus korupsi harus dituntaskan dengan melibatkan narasumber yang pro maupun kontra pada keterlibatan Ibas dalam kasus Hambalang. Sedangkan analisis skrip pada Jurnal Nasional lebih memperlihatkan adanya penggunaan narasumber pro Ibas dan mempertanyakan pihak-pihak yang kontra dengan melakukan upaya hukum dengan alasan pencemaran nama baik.

Pada aspek tematik, Koran Tempo dan Jurnal Nasional menonjolkan dugaan keterlibatan Ibas dengan sudut pandang berbeda. Tempo lebih memperlihatkan sisi penuntasan kasus secara hukum, sedangkan Jurnal Nasional mencoba mengaitkan keterlibatan Ibas dengan dampak politik dengan menelusuri di balik pihak-pihak yang dianggap kontra. Pada aspek retorik, Koran Tempo menggunakan leksikon dan grafis bersifat kritis dengan menonjolkan tindakan KPK dan mengategorikan kasus ini sebagai catatan hitam Ibas. Sedangkan Jurnal Nasional juga banyak menggunakan leksikon dan grafis di bagian *headline* tetapi lebih mengarah pada penggambaran ketidakterlibatan Ibas dalam kasus Hambalang.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan cara Koran Tempo dan Jurnal Nasional dalam mengkonstruksikan realitas mengenai dugaan keterlibatan Ibas dalam kasus Hambalang. Koran Tempo memberitakan keterlibatan Ibas dengan lebih kritis dan melihat pada sisi penyelesaian masalah oleh KPK dalam memproses dugaan keterlibatan Ibas. Sedangkan pemberitaan Jurnal Nasional cenderung memperlihatkan bahwa Ibas tidak terlibat dalam kasus Hambalang dengan meragukan bukti-bukti yang mengarah pada Ibas.

Analisis *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki yang dilakukan pada penelitian terdahulu ini kurang menonjolkan mengenai objek-objek pemberitaan yang dianggap sebagai aktor utama untuk dipersalahkan atau didukung keberadaannya. Berbeda halnya dengan penggunaan *framing* Entman yang lebih menampilkan pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab pada permasalahan dan siapa saja yang dianggap diselamatkan atau terselamatkan

dalam pemberitaan melalui empat konsep yaitu: *define problems* (pendefinisian masalah), *diagnose causes* (memperkirakan penyebab masalah), *make moral judgement* (membuat pilihan moral), dan *treatment recommendation* (menekankan penyelesaian masalah). Sama seperti penelitian terdahulu pertama, konsep *framing* Entman dipilih karena akan lebih memberikan kesempatan bagi peneliti untuk lebih menunjukkan arah keberpihakan media massa melalui elemen makro. Kategorisasi mikronya berupa pemilihan bahasa, istilah, kutipan, dan hal-hal penunjang yang menjadi perhatian peneliti dapat ditentukan berdasarkan objektivasi peneliti.

2.2 Konstruksi Sosial Atas Realitas

Konstruksi sosial pada awal pembentukannya berasal dari adanya filsafat konstruktivisme yang dimulai dari gagasan-gagasan konstruktif kognitif sebagaimana diungkapkan Glaserfeld dalam Bungin (2008: 13) bahwa, “Konstruktif kognitif muncul pada abad ini dalam tulisan Mark Baldwin yang secara luas diperdalam dan disebar oleh Jean Piaget. Namun, apabila ditelusuri, sebenarnya gagasan-gagasan pokok konstruktivisme sebenarnya telah dimulai oleh Giambattista Vico, seorang epistemolog dari Italia, ia adalah cikal bakal konstruktivisme.”

Dalam aliran filsafat, gagasan konstruktivisme telah muncul sejak Sokrates menemukan jiwa dalam tubuh manusia, sejak Plato menemukan akal budi dan ide. Gagasan tersebut semakin lebih konkret lagi setelah Aristoteles mengenalkan istilah, informasi, relasi, individu, substansi, materi, esensi, dan sebagainya

sebagaimana diungkapkan Bertens dalam Bungin (2008: 13) bahwa, “Manusia adalah makhluk sosial, setiap pernyataan harus dibuktikan kebenarannya, bahwa kunci pengetahuan adalah logika dan dasar pengetahuan adalah fakta.”

Istilah konstruksi realitas menjadi terkenal sejak dipublikasikan Berger dan Luckmann. Mereka menggambarkan proses sosial melalui tindakan dan interaksinya di mana individu secara intens menciptakan suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif sebagaimana diungkapkan Sobur (2009: 91) bahwa, “Realitas sosial sesungguhnya tidak lebih dari sekadar hasil konstruksi sosial dalam komunikasi tertentu”

Konstruktivisme dilihat sebagai sebuah kerja kognitif individu untuk menafsirkan dunia realitas yang ada, karena terjadi relasi sosial antara individu dengan lingkungan atau orang di sekitarnya. Lahirnya konstruksi sosial dari adanya konstruktivisme kognitif sebagaimana dijelaskan Sobur (2012: 11) bahwa, “Individu membangun sendiri realitas yang dilihatnya itu berdasarkan struktur pengetahuan yang telah ada sebelumnya, yang oleh Piaget disebut dengan skema skemata. Konstruktivisme macam inilah yang oleh Berger dan Luckmann disebut dengan konstruksi sosial.”

Berger dan Luckmann dalam Bungin (2008: 15) menjelaskan mengenai terbentuknya realitas yang ada atas interaksi individu dengan masyarakatnya, bahwa “Terjadi dialektika antara individu menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu. Proses dialektika ini terjadi melalui eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.”

Eksternalisasi merupakan usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia ke dalam dunia, baik dalam kegiatan mental maupun fisik. Ini sudah menjadi sifat dasar dari manusia, ia akan selalu mencurahkan diri ke tempat di mana ia berada. Manusia tidak dapat kita mengerti sebagai ketertutupan yang lepas dari dunia luarnya. Manusia berusaha menangkap dirinya, dalam proses inilah dihasilkan suatu dunia dengan kata lain, manusia menemukan dirinya sendiri dalam suatu dunia.

Objektivasi merupakan hasil yang telah dicapai baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia tersebut. Hasil itu menghasilkan realitas objektif yang bisa jadi akan menghadapi si penghasil itu sendiri sebagai suatu faktisitas yang berada di luar dan berlainan dari manusia yang menghasilkannya. Lewat proses objektivasi ini, masyarakat menjadi suatu realitas suigeneris. Hasil dari eksternalisasi kebudayaan itu misalnya, manusia menciptakan alat demi kemudahan hidupnya atau kebudayaan non-materiil dalam bentuk bahasa. Baik alat tadi maupun bahasa adalah kegiatan eksternalisasi manusia ketika berhadapan dengan dunia, ia adalah hasil dari kegiatan manusia. Setelah dihasilkan, baik benda atau bahasa sebagai produk eksternalisasi tersebut menjadi realitas yang objektif. Bahkan ia dapat menghadapi manusia sebagai penghasil dari produk kebudayaan. Kebudayaan yang telah berstatus sebagai realitas objektif, ada di luar kesadaran manusia, ada “di sana” bagi setiap orang. Realitas objektif itu berbeda dengan kenyataan subjektif perorangan. Ia menjadi kenyataan empiris yang bisa dialami oleh setiap orang.

Internalisasi merupakan penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sedemikian rupa sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Berbagai macam unsur dari dunia yang telah terobjektifkan tersebut akan ditangkap sebagai gejala realitas di luar kesadarannya, sekaligus sebagai gejala internal bagi kesadaran. Melalui internalisasi, manusia menjadi hasil dari masyarakat. Realitas itu tidak dibentuk secara ilmiah, tidak juga sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya, ia dibentuk dan dikonstruksi. Dengan pemahaman semacam ini, realitas berwajah ganda/plural. Setiap orang bisa mempunyai konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas. Setiap orang yang mempunyai pengalaman, preferensi, pendidikan tertentu, dan lingkungan pergaulan atau sosial tertentu akan menafsirkan realitas sosial itu dengan konstruksinya masing-masing.

Bahasa berperan dalam menciptakan realitas, kata-kata tertentu tidak hanya memfokuskan perhatian khalayak pada masalah tertentu, tetapi juga membatasi persepsi khalayak dan mengarahkan pada cara berpikir serta keyakinan tertentu sebagaimana diungkapkan Burke dalam Saripudin dan Hasan (2003:18) bahwa, “Dengan kata lain, kata-kata yang dipakai dapat membatasi seseorang untuk melihat perspektif lain, menyediakan aspek tertentu dari suatu peristiwa, dan mengarahkan khalayak untuk memahami suatu peristiwa “

Persepsi dan pandangan kita tentang realitas, dikonstruksikan oleh kata-kata dan tanda-tanda lain yang digunakan dalam konteks sosial, sebagaimana diungkapkan Straaten dalam Sobur (2012: 87) bahwa “Yang dapat kita tangkap hanyalah tampilan (*appearance*) dari realitas di baliknya. Hal ini dikarenakan

manusia memiliki keterbatasan dalam melihat realitas yang disebabkan karena faktor ruang dan waktu. Sehingga tidak dapat mengalami dua realitas yang berbeda di dalam ruang dan waktu yang simultan serta dalam waktu yang sama.”

Dalam pembentukan realitas terdapat peran penting bahasa, seperti diungkapkan oleh Hall dalam Eriyanto (2008: 29) bahwa, “Bahasa dan wacana dianggap sebagai arena pertarungan sosial dan bentuk pendefinisian realitas. Bahasa sebagaimana dianggap oleh kalangan strukturalis merupakan sistem penandaan. Pada peristiwa yang sama sekalipun, realitas dapat ditandakan secara berbeda.”

Dalam pemaknaan suatu realitas dapat memungkinkan perbedaan penafsiran. Pada kenyataannya hanya satu makna yang bisa diterima. Kemenangan satu makna terhadap makna yang lainnya ini sebagaimana diungkapkan Hall dalam Eriyanto (2008: 29) bahwa, “Tidak dapat dilepaskan dari bagaimana wacana dominan membentuk, menghitung definisi, dan membentuk batas-batas dari pengertian tersebut. Wacana sendiri dipahami sebagai arena pertarungan sosial yang diartikulasikan lewat bahasa. Begitu pula dalam menginterpretasikan makna.

Fungsi bahasa yang paling utama adalah sebagai sarana komunikasi sebagaimana diungkapkan Halliday dalam Hamad (2004: 12) yang mengemukakan 3 meta fungsi bahasa, antara lain:

1. Fungsi ideasional (*ideational function*); berkaitan dengan peranan bahasa untuk mengungkapkan ide, gagasan, dan isi pikiran, serta untuk merefleksikan realitas pengalaman partisipannya.

2. Fungsi interpersonal (*interpersonal function*); berkaitan dengan peranan bahasa untuk membangun dan memelihara hubungan sosial, untuk mengungkapkan peranan-peranan sosial dan peranan komunikasi yang diciptakan oleh bahasa itu sendiri.
3. Fungsi tekstual (*textual function*); berkaitan dengan peranan bahasa untuk membentuk berbagai mata rantai kebahasaan dan mata rantai unsur situasi yang memungkinkan digunakannya bahasa oleh para pemakainya. Secara singkat fungsi bahasa di sini untuk menyediakan kerangka, wacana yang relevan terhadap situasi.

Bahasa tidak dapat dipisahkan dari kehidupan komunikasi kita terutama dalam bidang media massa, bahasa tidak hanya menjadi alat semata untuk menggambarkan sebuah realitas, melainkan bisa menentukan gambaran (makna citra) mengenai suatu realitas-realitas media yang muncul di benak khalayak. Media pun memiliki beragam cara untuk mempengaruhi bahasa dan makna ini. Misalnya saja dengan mengembangkan kata-kata baru beserta makna asosiatifnya, memperluas makna dari istilah-istilah yang ada, mengganti makna lama sebuah istilah dengan makna baru ataupun memantapkan konvensi makna yang telah ada dalam satu sistem bahasa.

Realitas didefinisikan secara terus menerus melalui praktik bahasa yang bermakna sebagai pendefinisian selektif terhadap realitas yang ditampilkan. Hal ini mengakibatkan suatu persoalan atau peristiwa di dunia nyata tidak mengandung atau menunjukkan makna integral, tunggal, dan intrinsik. Makna yang muncul hanyalah makna yang ditransformasikan lewat bahasa. Bahasa dan simbolisasi

adalah perangkat yang memproduksi makna. Dalam proses konstruksi realitas, bahasa adalah unsur utama sebagaimana diungkapkan Berger dan Luckmann dalam Hamad (2004: 12) bahwa,

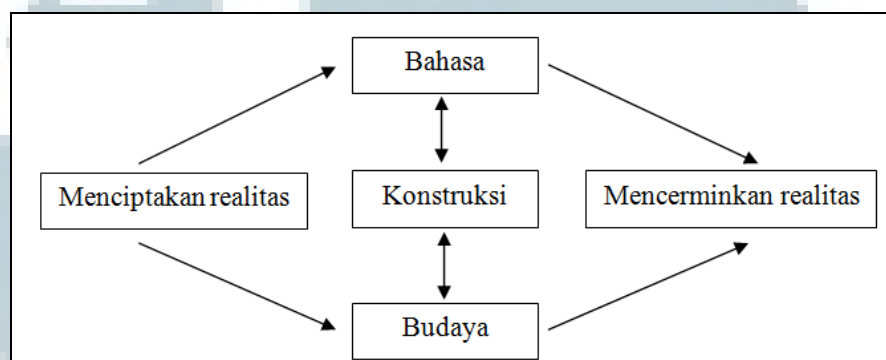
Proses konstruksi realitas dimulai ketika seorang konstruktor melakukan objektivitas terhadap suatu kenyataan yakni melakukan persepsi terhadap suatu objek. Selanjutnya, hasil dari pemaknaan melalui proses persepsi itu diinternalisasikan ke dalam diri seorang konstruktor. Dalam tahap ini dilakukan konseptualisasi terhadap suatu objek yang dipersepsi. Langkah terakhir adalah melakukan eksternalisasi atas hasil dari proses perenungan secara internal tadi melalui pernyataan-pernyataan. Alat pembuat pernyataan tersebut tiada lain adalah kata-kata atau konsep atau bahasa.

Kita individu bercerita pada orang lain, esensi yang ingin disampaikan adalah makna. Setiap kata, angka, atau simbol lain dalam bahasa yang kita pakai untuk menyampaikan pesan tersebut mengandung makna. Setiap rakitan antara kata dengan kata yang lain akan menghasilkan suatu makna dan penampilan secara keseluruhan sebuah wacana yang dibangun dari kata-kata juga akan bisa menimbulkan makna tertentu pula. Penggunaan bahasa tertentu akan berimplikasi pada konstruksi realitas dan makna yang dikandungnya. Media massa tidak lagi sekadar menyampaikan laporan mengenai berbagai peristiwa, tetapi juga menanamkan makna sebagaimana diungkapkan Hamad (2004: 13) bahwa, “Penggunaan makna berpengaruh terhadap konstruksi realitas, terlebih atas makna atau citra yang dibangunnya. Hal ini disebabkan bahwa bahasa mengandung makna.”

Dengan demikian pemilihan kata dan cara menyajikan suatu realitas akan ikut menentukan struktur konstruksi realitas dan makna yang muncul darinya sebagaimana diungkapkan Giles dan Wiemann dalam Hamad (2004: 14) bahwa, “Bahasa mampu menentukan konteks, bukan sebaliknya teks menyesuaikan diri

dengan konteks. Dengan begitu, lewat bahasa yang dipakainya (melalui pilihan kata dan cara penyajiannya) seseorang bisa mempengaruhi orang lain (menunjukkan kekuasaannya). Melalui teks yang dibuatnya, ia dapat memanipulasi konteks.”

Gambar 2.1
Hubungan antara bahasa dan realitas



(Sumber: Saripudin dan Hasan, 2003: 18)

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa bahasa mampu untuk menciptakan suatu citra dari realitas yang ada. Maka, tidak dapat dipungkiri bahwa media dapat dijadikan sebagai alat yang ampuh membangun citra seseorang untuk mendapatkan simpati dari khalayak atau sebaliknya meruntuhkan seseorang sebagai bagian dari dampak yang dikonstruksikan oleh realitas melalui bahasa.

2.3 Konstruksi Sosial Media Massa

Media massa merupakan salah satu bentuk realitas yang telah dikonstruksi dalam bentuk berita, gambar, atau sebagainya sehingga media massa dapat dijadikan alat propaganda karena dianggap mampu mengkonstruksikan realitas sosial dalam pandangan media massa sebagaimana diungkapkan Eriyanto (2007: 23) bahwa, “Media massa bukanlah sekadar alat untuk menyalurkan pesan saja, di

dalamnya ia juga subjek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias, dan pemihakannya.”

Berita dalam media massa dihasilkan bukan hanya menggambarkan realitas, tetapi juga merupakan hasil dari konstruksi media itu sendiri. Media massa dipandang sebagai agen konstruksi yang mendefinisikan realitas. Lewat berbagai instrumen yang dimilikinya, media ikut membentuk realitas yang tersaji dalam pemberitaan. Fakta yang terkandung di dalamnya sudah mengalami penyaringan dari media itu sendiri sebagaimana diungkapkan Chomsky (2006: 5) bahwa “Fakta di media massa hanyalah hasil rekonstruksi dan olahan para pekerja redaksi. Walaupun mereka telah bekerja dengan menerapkan teknik-teknik presisi, tetapi tetap saja kita tidak dapat mengatakan bahwa apa yang mereka tulis adalah fakta yang sebenarnya.”

Wartawan dari masing-masing media bisa jadi mempunyai pandangan, dukungan, dan konsep yang berbeda ketika melihat suatu realitas. Hal itu dapat dilihat dari bagaimana para pekerja media satu dan lainnya memiliki perbedaan cara memberitakan karena mengkonstruksikan peristiwa yang diwujudkannya. Dari anggapan itulah, maka sangat potensial terjadi peristiwa yang sama dikonstruksi secara berbeda antara media yang satu dengan media yang lainnya karena adanya kepentingan-kepentingan yang dikonstruksikan melalui media massa sebagaimana diungkapkan Bungin (2008: 192) bahwa, “Konstruksi sosial tidak berlangsung dalam ruang hampa, namun sarat dengan kepentingan-kepentingan.”

Realitas dalam berita hadir dalam keadaan subjektif karena realitas tercipta lewat konstruksi, sudut pandang, dan ideologi wartawan. Sebuah teks dalam sebuah berita tidak dapat disamakan sebagai cerminan dari realitas, tetapi ia harus dipandang sebagai konstruksi atas realitas. Pada hakikatnya isi media adalah hasil konstruksi realitas dengan bahasa sebagai perangkat dasarnya. Peran media tentunya sangat penting bagi masyarakat, yakni bagaimana media menampilkan sebuah realitas. Dalam penyampaian ini digunakanlah bahasa sebagai bahan baku guna memproduksi berita. Berita-berita yang dikonsumsi khalayak setiap hari adalah realitas yang telah dibahasakan oleh para komunikator massa yang menjadi asumsi dasar dalam memahami konstruksi sosial media massa.

Pemahaman mengenai konstruksi media massa menunjukkan adanya sikap-sikap konstruktif dalam memandang peristiwa. Berita disajikan dengan begitu masifnya melalui media massa sehingga media massa berperan aktif dalam mengkonstruksikan realitas atas adanya opini-opini yang terbentuk dari pemberitaannya, sebagaimana diungkapkan Bungin (2008: 203) bahwa “Substansi teori konstruksi sosial media massa adalah pada sirkulasi informasi yang cepat dan luas sehingga konstruksi sosial berlangsung dengan sangat cepat dan sebarannya merata. Realitas yang terkonstruksi itu juga membentuk opini massa, massa cenderung apriori dan opini massa cenderung sinis.”

Ada beberapa tahapan-tahapan dalam proses konstruksi sosial media massa sebagaimana diungkapkan Bungin (2008: 188) antara lain: “Tahap menyiapkan materi konstruksi; tahap sebaran konstruksi; tahap pembentukan konstruksi; tahap konfirmasi.

1. Tahap Menyiapkan Materi Konstruksi

Isu-isu penting yang setiap hari menjadi fokus media massa, berhubungan dengan tiga hal, yaitu kedudukan (takhta), harta, dan perempuan. Selain tiga hal itu ada juga fokus-fokus lain, seperti informasi yang sifatnya menyentuh perasaan banyak orang, yaitu persoalan-persoalan sensitivitas, sensualitas, maupun ketakutan/kengerian. Ada tiga hal penting dalam penyiapan materi konstruksi sosial, yaitu: (1) Keberpihakan media massa kepada kapitalisme. Artinya, media massa digunakan oleh kekuatan-kekuatan kapital untuk dijadikan sebagai mesin penciptaan uang/pelipatgandaan modal. (2) Keberpihakan semu kepada masyarakat. Artinya, bersikap seolah-olah simpati, empati, dan berbagai partisipasi kepada masyarakat. (3) Keberpihakan kepada kepentingan umum. Artinya sebenarnya adalah visi setiap media massa, namun akhir-akhir ini visi tersebut tak pernah menunjukkan jati dirinya, namun slogan-slogan tentang visi ini tetap terdengar.

2. Tahap Sebaran Konstruksi

Prinsip dasar dari sebaran konstruksi sosial media massa adalah semua informasi harus sampai pada pemirsa atau pembaca secepatnya dan setepatnya berdasarkan pada agenda media. Apa yang dipandang penting oleh media, menjadi penting pula bagi pemirsa atau pembaca.

3. Pembentukan Konstruksi Realitas

a. Tahap Pembentukan Konstruksi Realitas

Tahap berikut setelah sebaran konstruksi, di mana pemberitaan (penceritaan) telah sampai pada pembaca dan pemirsanya (penonton),

yaitu terjadi pembentukan konstruksi di masyarakat melalui tiga tahap yang berlangsung secara generik. Pertama, konstruksi realitas pembedaan; kedua, kesediaan dikonstruksi oleh media massa; ketiga, sebagai pilihan konsumtif.

b. Pembentukan Konstruksi Citra

Pembentukan konstruksi citra adalah bangunan yang diinginkan oleh tahap konstruksi di mana bangunan konstruksi citra yang dibangun oleh media massa ini terbentuk dalam dua model; (1) *model good news (story)* dan (2) *model bad news (story)*.

4. Tahap Konfirmasi

Konfirmasi adalah tahapan ketika media massa maupun pembaca dan pemirsa (penonton) memberi argumentasi dan akuntabilitas terhadap pilihannya untuk terlibat dalam tahap pembentukan konstruksi. Bagi media, tahapan ini diperlukan sebagai bagian untuk memberi argumentasi terhadap alasan-alasan konstruksi sosial. Sedangkan bagi pemirsa dan pembaca (penonton), tahapan ini juga sebagai bagian untuk menjelaskan mengapa ia terlibat dan bersedia hadir dalam proses konstruksi sosial

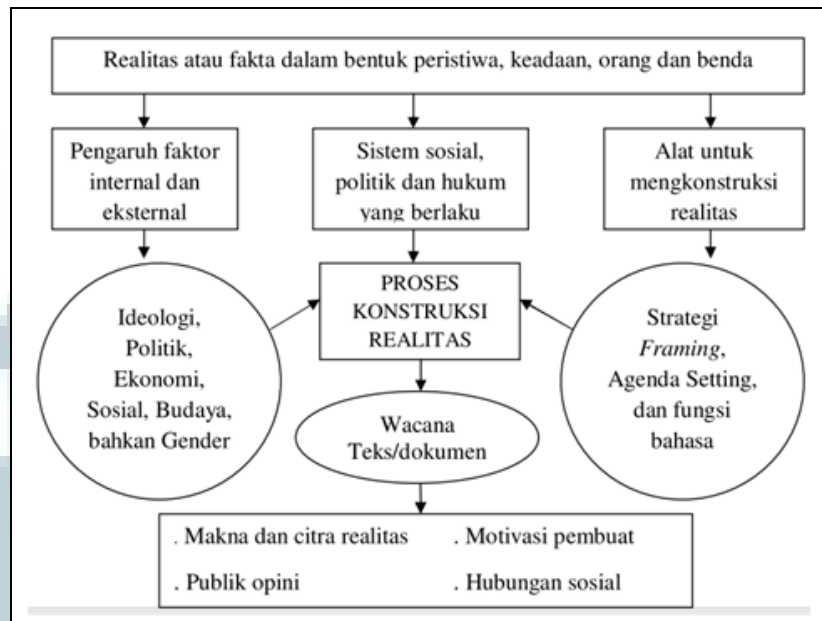
Pada prinsipnya, setiap upaya menceritakan sebuah peristiwa, keadaan, atau benda tak terkecuali mengenai hal-hal yang berkaitan dengan politik hingga hiburan adalah usaha mengkonstruksi realitas. Penyusunan realitas secara subjektif juga terjadi dalam pembuatan dan penulisan berita. Dari yang awalnya berbentuk data atau fakta yang acak dan terpecah-pecah menjadi sistematis dalam bentuk realitas simbolik berupa berita dan cerita sebagaimana diungkapkan

Saripudin dan Hasan (2003: 15) bahwa, “Sesungguhnya berita-berita yang dikonsumsi khalayak setiap hari adalah realitas (peristiwa, keadaan, benda) yang telah dibahasakan oleh para komunikator massa.”

Bahasa kemudian menunjukkan peran pentingnya dalam membangun konsep konstruksi sosial media massa. Bahasa bukan hanya sebagai mediator komunikasi, tetapi bahasa menjadi agen realitas yang dapat menentukan gambaran dari realitas yang ingin dibentuk sebagaimana diungkapkan Sobur (2012: 89) bahwa, “Bahasa memang digunakan sebagai bahan baku guna memproduksi berita. Akan tetapi, bahasa bukan sekadar alat komunikasi untuk menyampaikan fakta, informasi, atau opini. Bahasa juga bukan sekadar alat komunikasi untuk menggambarkan realitas, namun juga menentukan gambaran atau citra tertentu yang hendak ditanamkan kepada publik.”

Dalam proses penyusunan kembali realitas dari adanya realitas, kemudian realitas tersebut tersusun kembali dalam bentuk teks berita yang bermakna dan disebut sebagai upaya konstruksi makna. Media massa mengkonstruksikan realitas melalui berbagai sarana yang mengkonsepkan realitas berdasarkan pemahaman subjektifnya. Proses konstruksi sosial media massa tersebut dapat digambarkan dalam bagan alur proses konstruksi realitas berikut ini:

Gambar 2.2
Proses Konstruksi Sosial Media Massa



(Sumber: Syahputra, 2006: 75)

Gambaran di atas menjelaskan bahwa lahirnya wacana teks senantiasa dimulai dengan peristiwa yang terjadi baik yang menyangkut peristiwa, keadaan, maupun aktor (tokoh). Dalam pengkonstruksian realitas tersebut akan membentuk makna dan citra tertentu, namun hal ini tergantung dari faktor sistem media massa yang berlaku, yaitu dilihat dari faktor internal dan eksternal dari pihak media itu sendiri, serta alat atau strategi pengkonstruksian yang dipilih, yaitu dengan fungsi bahasa, strategi *framing*, dan agenda *setting*.

Media dalam menentukan fakta atau realitas yang akan dimunculkan dalam bentuk teks berita juga tidak lepas dari adanya pengaruh faktor-faktor di luar media. Jadi, selain etika, moral, atau ideologi yang dimiliki oleh para pekerja media ini dalam menentukan isi media, ada faktor-faktor di luar media yang ikut serta mempengaruhi struktur penampilan isi media sebagaimana diungkapkan Winata dalam Saripudin dan Hasan (2003: 17) bahwa,

Apa yang disiarkan media adalah produk intelektual yang penuh dengan muatan dan kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan budaya dari pemilik, pengelola dan pendukung media itu sendiri. Artinya, media bukan sekadar pelaku dalam proses konstruksi realitas sosial dalam sebuah arena publik, tetapi juga wadah bagi segala subjektivitas kepentingan berbagai kelompok yang ada dalam masyarakat, termasuk di dalamnya ideologi profesional yang secara riil dipraktekkan para pekerja media.

Jadi realitas yang ditampilkan dalam teks berita oleh media bukan lagi menjadi laporan yang bersifat objektif. Berita yang dibaca oleh khalayak pada dasarnya adalah hasil dari konstruksi kerja jurnalistik serta subjektivitas kepentingan dari berbagai kelompok yang ikut mempengaruhi isi media itu. Semua hasil proses konstruksi (mulai dari memilih fakta, pemakaian kata, gambar, sampai penyuntingan) memberi andil bagaimana realitas tersebut akhirnya dihadirkan di hadapan khalayak. Adanya pemilihan kata dan cara penyajian suatu realitas oleh media akan ikut menentukan struktur konstruksi realitas dan makna yang muncul selanjutnya.

2.4 Analisis *Framing*

Konsep *framing* kini telah digunakan secara luas dalam literatur ilmu komunikasi untuk menggambarkan proses penyeleksian dan penyorotan aspek-aspek khusus sebuah realitas oleh media massa. Dalam ilmu komunikasi, konsep *framing* sering digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu dari realitas oleh media massa. *Framing* dapat dipandang sebagai penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapatkan alokasi lebih besar dari isu yang lain. Cara pandang media massa

atau wartawan itu sebagai kemasan (*package*) yang mengandung konstruksi makna atas peristiwa yang akan diberitakan.

Frame adalah cara bercerita atau gugusan ide-ide yang terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Pemahaman mengenai pembingkaiannya menurut Goffman dalam Sobur (2012: 163) diungkapkan bahwa,

Secara sosiologis konsep *frame analysis* memelihara kebiasaan kita mengklasifikasi, mengorganisasi, dan menginterpretasi secara aktif pengalaman-pengalaman hidup kita agar dapat dipahami. Skema interpretasi itu disebut *frames*, yang memungkinkan individu dapat melokalisasi, merasakan, mengidentifikasi, dan memberi label terhadap peristiwa-peristiwa serta informasi.

Dengan konsep yang sama Gitlin mendefinisikan *frame* sebagai seleksi, penegasan dan eksklusi yang ketat. Ia menghubungkan konsep itu dengan proses memproduksi wacana berita dengan mengatakan, *frames* memungkinkan para jurnalis memproses sejumlah besar informasi secara cepat dan rutin, sekaligus mengemas informasi demi penyiaran yang efisien kepada khalayak. *Framing* merupakan sebuah realitas yang kompleks dipahami dan disederhanakan dalam kategori tertentu. Penyajian realitas yang demikian, membuat realitas lebih bermakna dan dipahami. Pusat perhatian dalam analisis *framing* adalah pembentukan pesan dari suatu teks, terutama melihat bagaimana pesan atau peristiwa dikonstruksi oleh media. Sejalan dengan penjelasan tersebut, Eriyanto (2007: 10) mengungkapkan bahwa, “Analisis *framing* adalah analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas. Analisis *framing* juga dipakai untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media.”

Untuk itu, analisis *framing* dapat memberikan kemampuan dalam melihat cara media massa membentuk makna yang ingin disampaikan melalui tulisannya sebagai produk yang dikonstruksikan sebagaimana diungkapkan Sobur (2012: 162) bahwa, “Pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, serta hendak dibawa ke mana berita tersebut.”

Analisis *framing* diperlihatkan sebagai cara yang dipakai untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi, memahami, maupun membingkai suatu realitas oleh media melalui pendekatan untuk mengetahui bagaimana cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita sebagai kemasan. *Framing* sebagai tahap penyeleksian dari berbagai aspek peristiwa agar lebih menonjol dalam sebuah teks komunikasi sehingga mendapatkan alokasi besar dari sisi lain. *Frame* dapat dipahami sebagai cara bercerita atau gugusan ide-ide yang terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Entman dalam Eriyanto (2007: 67) menyatakan bahwa, “*Framing* sebagai suatu proses seleksi dari berbagai aspek sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan aspek lain. Ia juga menyertakan penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga isi tertentu mendapatkan alokasi besar daripada sisi lain.”

Dalam perspektif komunikasi, analisis *framing* dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi saat mengkonstruksi fakta. Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih diingat, untuk menggiring “interpretasi” khalayak sesuai perspektifnya. Meskipun berbeda dalam penekanan dan pengertian, ada titik singgung utama dari definisi-definisi *framing*, yaitu pendekatan untuk melihat bagaimana realitas itu dibentuk dan dikonstruksi oleh media. Proses pembentukan dan konstruksi realitas itu, hasil akhirnya adalah adanya bagian tertentu dari realitas yang lebih menonjol dan lebih mudah dikenal.

Menurut Eriyanto (2007: 70) ada dua aspek dalam *framing* yang dapat dikedepankan dalam upaya memaknai berita, yaitu:

1. Memilih fakta/realitas. Proses memilih fakta ini didasarkan pada asumsi, wartawan tidak mungkin melihat peristiwa tanpa perspektif. Dalam memilih fakta ini selalu terkandung dua kemungkinan: apa yang dipilih (*included*) dan apa yang dibuang (*excluded*). Intinya, peristiwa dilihat dari sisi tertentu. Akibatnya, pemahaman dan konstruksi atas suatu peristiwa bisa jadi berbeda antara satu media dengan media lain.
2. Menuliskan fakta. Proses ini berhubungan dengan bagaimana fakta yang dipilih itu disajikan kepada khalayak. Gagasan itu diungkapkan dengan kata, kalimat dan proposisi apa, dengan bantuan aksentuasi foto dan gambar apa, dan sebagainya. Elemen menulis fakta ini berhubungan dengan penonjolan realitas. Pemakaian kata, kalimat atau foto itu merupakan implikasi dari memilih aspek tertentu dari realitas.

Kedua proses ini membuat dunia lebih diketahui dan lebih dimengerti. Realitas yang kompleks dipahami dan disederhanakan dalam kategori tertentu dan membuat realitas lebih bermakna dan dimengerti bagi pembaca sebagai bentuk objektivitas media. Bentuk kebenaran bukan berarti nilai objektif menjadi mutlak didapat, karena nilai objektif merupakan hal yang membingungkan karena kemungkinan objektivitas mutlak tidak dapat ditemui. Objektivitas media massa memang selalu menjadi perdebatan karena objektivitas jurnalistik itu mustahil.

Nilai-nilai subjektif media massa dan wartawannya akan ikut memberi pengaruh dalam semua proses kerja jurnalistik. Semua kerja jurnalistik pada dasarnya subjektif dan mutlak mulai dari pencarian berita, peliputan, penulisan hingga pada editing berita. Hal-hal seperti alasan suatu peristiwa diliput, penentuan narasumber, daftar pertanyaan, arah kecenderungan berita, bagaimana berita ditulis, bagian mana yang ditonjolkan, semua proses tersebut menunjukkan pertimbangan subjektif. Nilai subjektivitas media massa ini dapat dilihat pada pemahaman Eriyanto (2007: 28) bahwa,

Praktik membuat liputan berita memihak satu pandangan dengan menempatkan pandangan kelompok lain yang oleh pendekatan positivistik dianggap sebagai tidak benar, dalam pandangan konstruksionis sebagai praktik jurnalistik. Karena itu, untuk mengerti kenapa praktik jurnalistik bisa semacam itu bukan dengan meneliti sumber bias, tetapi mengarahkan pada bagaimana berita dikonstruksi.

Saat wartawan meliput suatu peristiwa, secara sengaja atau tidak, ia akan menggunakan dimensi perseptualnya. Setiap realitas yang kompleks dan tidak beraturan dipahami dan untuk proses itu melibatkan penerapan konsep, melibatkan pemahaman yang mau tidak mau sukar dilepaskan dari subjektivitas. Jadi, jika dalam pemandangan positivis, wartawan sebuah media massa adalah

seorang pengamat dan harus mengambil jarak dengan objek yang diliputnya agar terhindar dari subjektivitas, maka dalam pandangan konstruksionis, ia tidak mungkin menjaga jarak dengan objek yang diliputnya. Sebagai seorang agen, wartawan mustahil mengambil jarak dan objek yang dia liput. Justru ketika membuat berita, ia sebetulnya telah menjamin adanya hubungan dengan objek yang dia liput.

Pada saat wartawan telah selesai meliput dan menulis peristiwa hingga menjadi berita, masih ada proses lainnya di dalam media massa tempatnya bernaung. Media massa akan memilih realitas mana yang diambil dan mana yang tidak. Selain itu, secara sadar atau tidak, media massa juga memilih aktor yang dijadikan sumber berita, sehingga hanya sebagian saja dari sumber berita yang ditampilkan dalam pemberitaan. Media massa juga berperan dalam mendefinisikan aktor dan peristiwa lewat bahasa yang digunakan dalam pemberitaan. Media massa dapat membingkai suatu peristiwa dengan bingkai tertentu yang pada akhirnya menentukan bagaimana cara khalayak harus melihat dan memahami peristiwa dalam kacamata tertentu. Jadi, berita yang disajikan juga menggambarkan konstruksi realitas dari media massa itu sendiri sebagaimana diungkapkan Eriyanto (2007: 25) bahwa,

Dalam pandangan positivis, berita adalah informasi. Ia dihadirkan kepada khalayak sebagai representasi dari kenyataan. Kenyataan itu ditulis kembali dan ditransformasikan lewat berita. Berita adalah refleksi dan pencerminan dari realitas. Berita adalah *mirror of reality*, karenanya ia harus mencerminkan realitas yang hendak diberitakan. Dalam pandangan konstruksionis, berita itu bukan menggambarkan realitas, tetapi potret dari arena pertarungan antara berbagai pihak yang berkaitan dengan peristiwa. Menurut kaum konstruksionis, berita adalah hasil dari konstruksi sosial di mana selalu melibatkan pandangan, ideologi dan nilai-nilai dari wartawan

atau media. Bagaimana realitas itu dijadikan berita sangat tergantung pada bagaimana fakta itu dipahami dan dimaknai.

Pada dasarnya, pekerjaan media massa adalah mengonstruksikan peristiwa atau realitas, sehingga isinya adalah hasil kerjanya mengonstruksikan berbagai realitas yang dipilihnya sebagaimana diungkapkan Tuchman dalam Sobur (2012: 88) bahwa, “Seluruh isi media massa adalah realitas yang telah dikonstruksikan karena sifat dan pada kenyataannya pekerjaan media massa adalah menceritakan peristiwa-peristiwa. Pembuatan berita di media massa pada dasarnya tidak lebih dari penyusunan realitas-realitas hingga membentuk sebuah cerita.”

Penonjolan adalah proses membuat informasi menjadi lebih bermakna. Realitas yang disajikan secara menonjol atau mencolok sudah tentu punya peluang besar untuk diperhatikan oleh khalayak dalam memahami realitas. *Framing* dijalankan oleh media massa dengan menyeleksi isu tertentu dan mengabaikan isu lain, serta menonjolkan aspek isu tersebut dengan menggunakan berbagai strategi wacana, seperti pengulangan, pemakaian grafis untuk mendukung dan memperkuat penonjolan, pemakaian tabel tertentu ketika menggambarkan orang atau peristiwa yang diberitakan.

2.5 Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan data pada laman mahkamahkonstitusi.go.id, sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide MK (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang

Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 Nopember 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul pada abad ke-20. Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945, maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat.

DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 melantik hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi memiliki visi yaitu, tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Misi MK yaitu untuk mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang modern dan

terpercaya, dan membangun konstusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi.

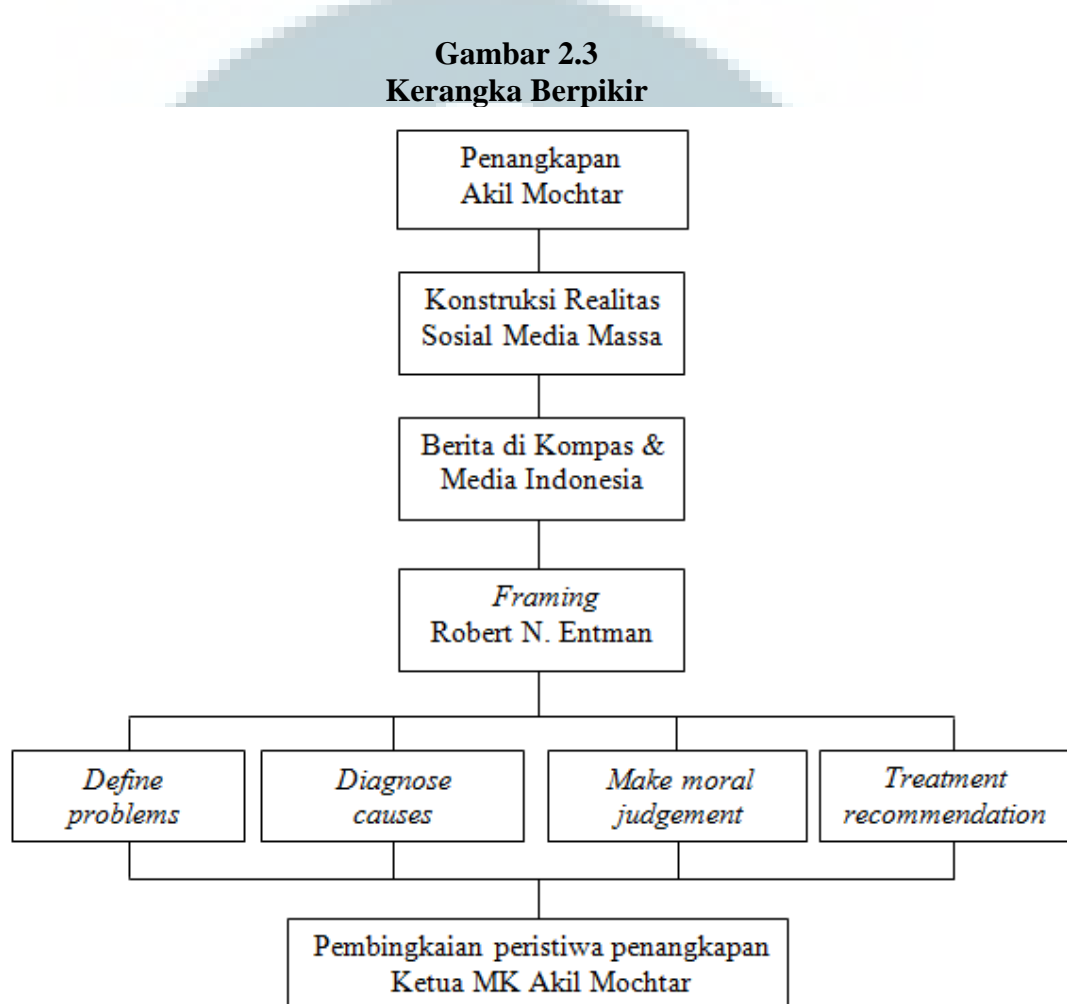
Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. MK mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Memutus Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Memutus pembubaran partai politik, dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi berkewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.6 Kerangka Pemikiran

Untuk memberikan gambaran dari alur penelitian, maka peneliti sajikan kerangka berpikir pada konsep *framing* Entman sebagai berikut:



UUMN